

## ABSTRAK

### **”TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARAS”**

Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Gaji tersebut harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan Pegawai Negeri dan mengenai sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil tidak bisa lepas dengan sistem pensiun dan kesejahteraan sosial Pegawai Negeri Sipil. Ada kalanya pensiunan tersebut mengalami daluarsa, sehingga penulis ingin mengetahui sejauh mana keadilan Pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara bagi seorang pensiun mengenai hak nya sebagai warga negara, ditinjau dari Hukum Admnistrasi Negara, dan bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara, Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Kemudian Pendekatan konseptual yang digunakan penulis adalah untuk membangun konsep mengenai dana pensiun sebagai suatu kewajiban yang harus dibayar Negara kepada penerima dana pensiun.

Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa pertama, penetapan daluarsa bagi pensiunan tetap menjadi tanggung jawab Negara dalam pembayaran pensiunannya. Kedua, penerapan Pasal 40 Undang-Undang Perbendaharaan Negara pada jaminan hari tua dan jaminan pensiun bagi PNS/ASN dianggap bertentangan dengan asas proporsionalitas dalam Hukum Administrasi Negara, karena hanya ditafsirkan secara sepihak oleh pemerintah dengan mengacu kepada satu peraturan perundang-undangan saja dan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan lain, padahal jaminan hari tua dan jaminan pensiun bagi PNS/ASN merupakan hak secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan serta merta melahirkan kewajiban yang mendasar bagi pemerintah untuk memberikannya secara rutin.

**Kata kunci :** *Perbendaharaan Negara, dana pensiun, asas proporsionalitas.*

## ABSTRACT

### **THE REVIEW OF ADMINISTRATIVE LAW AGAINST LAW NO. 1 OF 2004 ON STATE TREASURY IS ASSOCIATED WITH THE PRINCIPLES OF PROPORTIONALITY IN THE MANAGEMENT OF STATE FINANCES**

*Every Civil Servant is entitled to a fair and proper salary in accordance with the burden of work and responsibility. The salary should be able to spur productivity and ensure the welfare of Civil Servants and regarding payroll system Civil Servants can not be separated with pension system and social welfare of Civil Servants. There are times when the pensioner has expired, so the writer wants to know the extent of justice Article 40 of Law Number 1 Year 2004 About the State Treasury for a pension about his rights as a citizen, in view of the Law of State Administration, and how the application of the principle of proportionality in financial management country.*

*This research uses normative juridical research method by using the approach of legislation and conceptual approach. The statutory approach refers to the 1945 Constitution, Law Number 1 of 2004 on State Treasury Law No. 1 of 2004 on State Treasury, Law No.17 of 2003 on State Finances, Law no. 15 of 2004 on Audit of Management and Accountability of State Finance, Law No.43 of 1999 on the Principles of Personnel, Law Number 11 Year 1992 on Pension Fund. Then the conceptual approach used by the author is to build the concept of pension fund as an obligation to be paid by the State to the recipient of the pension fund.*

*The results of this study explain that first, the expiration of the pensioner is still the responsibility of the State in the payment of its pension. Second, the application of Article 40 of the State Treasury Law on old age pension and pensions guarantee for civil servants / ASN is considered to be contradictory to the principle of proportionality in the Law of State Administration, because it is only interpreted unilaterally by the government with reference to only one law and other laws and regulations, whereas old-age benefits and pensions for civil servants / ASNs constitute a constitutional right under the 1945 Constitution and necessarily give birth to a fundamental obligation for the government to provide it regularly.*

**Keywords:** *State Treasury, pension fund, principle of proportionality.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PANITIA SIDANG .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Kerangka Pemikiran .....	12
F. Metode Penelitian .....	24
G. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II    TINJAUAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI APARA- TUR NEGARA DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGA- RA TERHADAP PERBENDAHARAAN NEGARA</b>	
A. Pegawai Negeri Sipil Sebagai Aparatur Negara .....	31
B. Pegawai Negeri Sipil Sebagai Aparatur Negara Dalam Hu-	

	kum Administrasi Negara.....	34
<b>BAB III</b>	<b>PERBENDAHARAAN NEGARA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN ASAS PROPORSIONALITAS</b>	
	A. Perbedaharaan Negara.....	41
	B. Pengelolaan Keuangan Negara .....	56
	C. Asas Proporsionalitas Terhadap Perbendaharaan Negara dan Pengelolaan Keuangan Negara .....	58
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA</b>	
	A. Penetapan Daluwarsa dalam Penetapan Masa Pensiunan Menurut Hukum Administrasi Negara .....	63
	B. Pemberlakuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Terhadap Asas Proporsionalitas .....	77
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	90
	B. Saran.....	92
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	xii